Kode/ Nama Rumpun Ilmu*	**791/ Pendidikan Luar Biasa**
Bidang Fokus**	**Sosial Humaniora**

LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian

FAKTOR - FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KOTA BANJARMASIN

Ketua Peneliti:
Dr. H. Amka, M.Si

Anggota:
Utomo, M.Pd
Dewi Ekasari Kusumastuti, M.Pd
Mirnawati, M.Pd

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOVEMBER 2019

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian	:	Faktor-Faktor yang Berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin.
Lama Penelitian	:	2 bulan
Peneliti Utama		
Nama	:	Dr. H. Amka, M. Si
NIP	:	19620307 198103 1 003
Unit Kerja	:	Prodi Pendidikan Khusus FKIP ULM
Alamat Kantor	:	Jl. Brig. H. Hasan Basry, Banjarmasin
Anggota Peneliti	:	1. Utomo, M.Pd 2. Dewi Ekasari Kusumastuti, M. Pd 3. Mirnawati, M. Pd
Biaya Penelitian	:	Rp 20.000.000
Sumber Dana	:	PNBP ULM

Banjarmasin, 28 November 2019

Ketua Peneliti

Dr. H. Amka, M.Si
NIP. 196203071981031003

Mengetahui,

Dekan FKIP ULM

Dr. Chairil Faif Pasani, M. Si
NIP. 19650808 199303 1 003

Mengetahui,

Koordinator Prodi PLB

Dr. Imam Yuwono, M. Pd
NIP. 196608031991031014

Menyetujui,
Ketua LPPM ULM,

Prof. Dr. Ir. Darang Biyatmoko, M.Si
NIP. 196805071993031020

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul "faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif tingak sekolah dasar di Banjarmasin" tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari laoran penelitian ini adalah untuk melaporkan hasil penelitian terkait faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif tingak sekolah dasar di Banjarmasin. Penyusunan lapran penelitian ini tentu tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini. Penulis pun menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan proposal ini. Wassalam.

Banjarmasin, 28 November 2019



Penulis

DAFTAR ISI

COVER ---------- **i**

LEMBAR PENGESAHAN ---------- **ii**

KATA PENGANTAR ---------- **iii**

DAFTAR ISI ---------- **iv**

ABSTRAK ---------- **vi**

BAB I PENDAHULUAN ---------- **1**

A. Latar Belakang Masalah ---------- 4

B. Pertanyaan Penelitian ---------- 5

C. Tujuan Penelitian ---------- 5

D. Manfaat Penelitian ---------- 5

BAB II KAJIAN TEORI ---------- **7**

A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Inklusi ---------- 7

B. Tinjauan Tentang Implementasi Pendidikan Inklusi SD di Banjarmasin ---------- 15

BAB III METODE PENELITIAN ---------- **25**

A. Pendekatan Penelitian ---------- 25

B. Jenis Penelitian ---------- 25

C. Objek Penelitian ---------- 26

D. Subjek penelitian ---------- 26

E. Lokasi Penelitian ---------- 26

F. Teknik Pengumpulan Data ---------- 27

G. Instrumen Penelitian ---------- 30

H. Teknik Analisis Data ---------- 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ---------- **31**

A. Hasil Penelitian ---------- 31

B. Pembahasan ---------- 42

BAB V PENUTUP ---------- **49**

A. Kesimpulan ---------- 49
B. Saran ---------- 49
DAFTAR PUSTAKA---------- **50**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mendeskripsikan faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat non-eksperimen dnegan jeis penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau masa lampau, penelitian dilakukan di 21 SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalambentuk persentese. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah budaya dan komunikasi, sekolah, keluaga, dan kebijakan, dengan persentase 47% faktor budaya dan komunikasi, 29% keluarga, 14% sekolah, dan 10 % kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berkontribusi dalam penelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Banjarmasin adalah faktor budaya dan komunikasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menegaskan "setiap warga berhak mendapatkan pendidikan"; Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan "setiap warga ank a wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi ditengah masyarah.

Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak normal (non-ABK) usia sebayanya di kelas ank ar/biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima ABK di Sekolah Dasar terdekat merupakan

mimpi yang indah yang dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus.

Sayangnya, SD Inklusi yang sudah "terlanjur" menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus itu. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan karakteristik ABK dan regular. Guru belum siap untuk menangani anak-anak dikelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dan dengan perlakuakuan yang sama sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi di SD belum beriiringan dengan visi pendidikan berdasarkan inklusi ethos yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pedidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku dan sulit diakses oleh ABK masih ditemukan pada kelas inklusi. Pengintergrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru Karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru belum mendapatkan training yang praktikal dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja. Wali kelas dan atau guru bidang studi yang kedapatan dikelasnya ada ABK masih menunjukkan sikap "terpaksa" dalam mendampingi ABK memahami materi.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 tahun 2009 dalam Pokja Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan (2013). Nilai penting pendidikan inklusif adalah terciptanya pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik, baik reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Sekolah tidak membeda-bedakan peserta didik, semua siswa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama.

Sukses pelaksanaan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya faktor budaya, politik, sumber daya manusia (Kwon, 2005). Lain halnya dengan Prastiyono (2013: 120) yang mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain : (a) kebijakan hukum dan perundang-undangan, (b) sikap, pengalaman dan pengetahuan, (c) tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, (d) perubahan paradigma pendidikan seperti: desain pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar, (e) adaptasi lingkungan, dan (f) kerja sama kemitraan yang meliputi: pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat. Kemudian berbeda pula menurut pendekatan model Edwards III dalam Prastiyono (2013: 125), ada empat faktor yang akan mempengaruhi peluang keberhasilan ataupun

kegagalan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif tersebut. Keempat faktor tersebut meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap implementor, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas diketahui bahwa faktor-faktor tersebut memegang peranan penting terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Setiap sekolah inklusif memungkinkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda dan tingkat kontribusi masing-masing faktor penting untuk diketahui agar dapat lebih dioptimalkan. Hasil temuan diatas merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap tentang: "faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin". Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin.

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian ini menitikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kontribusi faktor-faktor tersebut dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin.
2. untuk mengetahui kontribusi faktor-faktor tersebut dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberi manfaat untuk layanan pendidikan kebutuhan khusus sebagai bahan teori maupun empirik (praktis).

1. Bagi para pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi dan kontribusi faktor-faktor tersebut dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin.
2. Bagi para praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data riil mengenai faktor-faktor yang berkontribusi dan kontribusi faktor-faktor tersebut dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin sehingga dapat dijadikan masukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah lain.

3. Bagi para peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai data awal yang diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang berkontribusi dan kontribusi faktor-faktor tersebut dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Inklusif

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dalam Ilahi (2013: 42), "pendidikan inklusif adalah sistem penyelengaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya."

Selanjutnya, pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna, antara lain: (1) proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespons keragaman individu; (2) mempedulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar; (3) anak kecil yang hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya; (4) diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, ekslusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004).

Senada dengan pernyataan diatas, pendidikan inklusif ramah anak mempunyai arti bahwa pendidikan/sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa,

atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat anak-anak berbakat (gifted children), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca, 1994, dalam Kustawan dan Hermawan, 2013).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berbakat (gifted children), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat. Namun, dalam pembahasan ini, pendidikan inklusif yang berfokus pada anak berkebutuhan khusus.

2. Tujuan Pendidikan Inklusif

Beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut tentang tujuan pendidikan inklusif, yaitu: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasandan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan

pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik (Ilahi, 2013).

Selanjutnya, menurut Skorten (2003:45), tujuan pendidikan inklusif adalah mengurangi kekhawatiran dan membangun, menumbuhkan loyalitas dalam persahabatan serta membangun sikap memahami dan menghargai.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

3. Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusif

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sebagai berikut:

a. Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulu dan menerapkan pembelajaran yang bersifat individual. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.
b. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi dan sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
c. Guru dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.

d. Kepala sekolah dan guru yang nantinya akan menjadi guru pembimbing khusus (GPK) harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusi.
e. Guru pembimbing khusus mendapatkan pelatihan teknis dalam memfasilitasi anak berkebutuhan khusus
f. Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui anak berkebutuhan khusus dan tindakan yang diperlukan
g. Mengadakan bimbingan khusus atau kesepahaman dan kesepakatan dengan orangtua anak berkebutuhan khusus.
h. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya dalam mengakses fasilitas pembelajaran
i. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010: 14).

Berkaitan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diatas, terdapat beberapa komponen sebagai penentu keberhasilan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, sebagai berikut:

a. Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar)

Kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya.

Dalam hal ini, model kurikulum (bahan ajarnya) disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sehingga kurikulum akademik dapat dipilah menjadi. Pertama, anak dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi disiapkan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi. Kedua, anak dengan kemampuan akademik sedang (di bawah rata-rata) disiapkan kurikulum fungsional/vokasional. Ketiga, anak dengan kemampuan akademik sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan diri. Juga perlu disiapkan kurikulum kompensatoris, yaitu kurikulum khusus untuk meminimalisir *barier* pada setiap anak berkebutuhan khusus sebelum belajar aspek akademik.

b. Tenaga Pendidik (Guru)

Guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa, memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan dari suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut menguasai sejumlah kemampuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, antara lain kemampuan menguasai bahan ajar, kemampuan dalam mengelola kelas, kemampuan dalam menggunakan metode, media, dan sumber belajar dan kemampuan untuk melakukan penilaian, baik proses maupun hasil. Kemampuan ini dalam upaya mencapai prinsip belajar yang telah dicanangkan oleh UNESCO sebagai empat pilar belajar.

c. Input Peserta didik

Kemampuan awal dan karakteristik siswa menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar, serta penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah inklusi.

Di lembaga pendidikan yang menyelenggarakan sekolah inklusif, semua peserta didik tanpa terkecuali harus terlibat aktif dalam mengelola kegiatan pembelajaran sehingga mampu menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki peserta didik yang berbeda dengan sekolah lain umumnya.

d. Lingkungan dan Penyelenggaraan Sekolah Inklusif

Terdapat beberapa faktor pendukung yang berkaitan dengan lingkungan yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu:

1) Orangtua berpartisipasi aktif dalam pembuatan rencana pembelajaran, pengadaan alat, media, dan sumber daya yang dibutuhkan sekolah. Selain itu, orangtua juga aktif berkomunikasi dan berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya, ikut berkolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar

anaknya, serta mengembangkan potensi anak melalui program-program lain di luar sekolah.

2) SLB berperan sebagai pusat sumber guna membantu melayani kebutuhan informasi dan konsultasi bagi sekolah dalam memahami kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus dan layanan pembelajaran, serta dalam pengadaan guru khusus, sosialisasi, dan pendampingan.

3) Pemerintah membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan di bidang pendidikan inklusi, menyediakan guru khusus, memberikan subsidi berupa bantuan anggaran khusus dan dalam pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan sekolah, program pendampingan, monitoring dan evaluasi program, maupun dalam sosialisasi ke masyarakat luas.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum (bahan ajar) yang dikembangkan. Dalam dunia pendidikan, sarana prasarana berkaitan langsung dengan ruang kelas, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling (BK), dan ruang multimedia.

f. Evaluasi Pembelajaran

Kegiatan evaluasi atau penilaian pada sekolah pada umumnya dilakukan dalam ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Evaluasi tersebut biasanya dilakukan secara serentak dan soalnya seragam untuk semua siswa. Hal ini dilakukan karena didasari asumsi bahwa siswa dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama atau hampir sama dengan demikian perbedaan individu nyaris tidak mendapat perhatian. Ditinjau dari sistem evaluasinya didasarkan pada acuan norma sehingga nilai rata-rata dan rangking menjadi konsekuensi logis sistem ini. Namun, bagi anak berkebutuhan khusus, jenis evaluasi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan kecerdasan mereka dalam menerima materi pelajaran.

Dalam pendidikan inklusif yang melayani pendidikan pada peserta didik yang mana perbedaan individu berada dalam rentang yang cukup besar, penilaian dengan sistem acuan kelompok kurang sesuai. Oleh karena itu, sistem penilaian dengan acuan patokan untuk masing-masing siswa berbeda akan lebih cocok. (ilahi, 2013)

Berdasarkan pernyataaan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat enam komponen sebagai penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu: (1) fleksibilitas kurikulum (bahan ajar), (2) tenaga pendidik (guru), (3) input peserta didik, (4) lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif, (5) sarana dan prasarana, (6) evaluasi pembelajaran. Selain itu juga terdapat sembilan hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal-hal tersebut

sangat penting untuk mengetahui kunci utama dalam mendorong efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif yang disertai dengan praktik pendidikan yang harus dilaksanakan demi menciptakan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

4. Kurikulum Sekolah Inklusi

Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak, yang selama ini anak dipaksakan mengikuti kurikulum. Oleh sebab itu hendaknya memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan anak. Menurut Tarmansyah (2007:154) untuk modifikasi kurikulum merupakan model kurikulum dalam sekolah inklusi. Modifikasi pertama adalah mengenai pemahaman bahwa teori model itu selalu merupakan representasi yang disederhanakan dari realitas yang kompleks.

Modifikasi kedua adalah mengenai aspek kurikulum yang secara khusus difokuskan dalam pembelajaran yang akan dibahas lebih banyak dalam praktek pembelajaran. Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusi adalah kurikulum anak normal (regular) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Lebih lanjut, menurut Direktorat PLB (Tarmansyah,2007:168) modifikasi dapat dilakukan dengan cara modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi/materi, modifikasi proses belajar mengajar, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan untuk belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas. Dengan kurikulum akan memberikan peluang terhadap

tiap-tiap anak untuk mengaktualisasikan potensinya sesuai dengan bakat, kemampuannya dan perbedaan yang ada pada setiap anak.

B. Tinjauan Tentang Kondisi Sekolah Dasar Inklusif di Kota Banjarmasin

1. Peraturan Tentang Pendidikan Inklusif di Kota Banjarmasin

a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009

Penyelenggaran sekolah dasar inklusif di kota Banjarmasin, salah satunya didasari oleh Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dalam Yuwono (2015), pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017

Sebagai wujud pernyataan Banjarmasin sebagai kota inklusi, terdapat peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah untuk memperkuat pernyataan tersebut, yaitu Perda No. 3 Tahun 2017 Pasal 32 dalam JDIH-Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (2017) melalui tiga ayat yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut: (1) pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, (2) penyelenggaraan

pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan, (3) anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pendidikan inklusif.

c. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2012

Selain Perda Provinsi Kalsel No. 3 Tahun 2017, penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Banjarmasin diatur juga oleh Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 65 Tahun 2012, yaitu: Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan.

Menurut PERGUB Provinsi Kalimantan Selatan No. 65 Tahun 2012 BAB IV Pasal 56 bahwa pendidikan inklusif adalah suatu upaya secara sadar dari pihak tertentu untuk mengembangkan potensi individu dengan menggunakan segala sumber daya seoptimal mungkin dalam upaya mempersiapkan kehidupan individu tersebut, dengan tekanan pada kaji ulang sistem sekolah dan perubahannya yang sesuai untuk setiap individu serta kompetensi dan materi pembelajaran disesuaikan potensi/kebutuhan individu yang bersangkutan, upaya ini dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal peserta didik (JDIH BPK RI, 2012).

Selanjutnya menurut PERGUB Provinsi Kalimantan Selatan No. 65 Tahun 2012 BAB IV Pasal 57 bahwa (1) Peserta didik pada pendidikan inklusif adalah seluruh anak usia sekolah baik yang akan dan sedang belajar pada pendidikan formal, nonformal dan informal, (2) Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pembelajaran dan evaluasinya disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang bersangkutan, (3) Perekrutan peserta didik oleh pendidikan formal mengutamakan/ memprioritaskan penerimaan didasarkan jarak terdekat domisili peserta didik ke sekolah (JDIH BPK RI, 2012).

Sehubungan dengan pemaparan di atas, pendirian satuan layanan pendidikan inklusif harus memenuhi beberapa syarat. Hal tersebut tercantum pada PERGUB Provinsi Kalimantan Selatan No. 65 Tahun 2012 BAB IV Pasal 61 yaitu sebagai berikut:

1) memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
2) mampu merancang dan menggunakan kurikulum berdiferensiasi;
3) tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar;
4) tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar;

5) tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik ; dan
6) mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangan masing-masing (JDIH BPK RI, 2012).

2. Data Tentang Jumlah Sekolah Dasar Inklusif di Kota Banjarmasin

Menurut Banjarmasin Post (2018) dalam artikelnya yang berjudul "Sekolah Inklusi Rujukan Ternyata Terbatas, Begini Kondisinya Saat Dipantau Anggota Dewan" bahwa di kota Banjarmasin, tidak semua sekolah menerapkan sistem pendidikan inklusi. Untuk sekolah menengah pertama (SMP) hanya ada lima sekolah yang menjadi rujukan inklusi, yaitu SMPN 8, 10, 14, 23, dan 35. Sedangkan untuk sekolah dasar (SD), dari 308 SD hanya 30 sekolah yang menjadi rujukan inklusi.

Sehubungan di atas, Nuryadi sebagai Kabid Pendididikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam Antara Kalsel (2018) pada artikelnya yang berjudul "SD Banjarmasin Ditargetkan Jadi Sekolah Inklusi" mengatakan, "semua SD di kota ini ditargetkan memberikan ruang bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus tersebut antara 1-10 persen total peserta siswa baru."

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah inklusif di Kota Banjarmasin masih minim dan belum merata sehingga

memerlukan perhatian dan tindakan dari pemerintah sebagai wujud bentuk kesiapan Banjarmasin menjadi inklusi khususnya pada jenjang sekolah dasar sesuai dengan fokus pembahasan pada penelitian ini.

3. Mekanisme Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin

a. Kriteria Sekolah Piloting Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Sekolah piloting penyelenggara pendidikan inklusif Kalimantan Selatan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a) Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua/ masyarakat)
b) Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah
c) Tersedia guru pembimbing khusus, baik yang berstatus guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain, atau berkesanggupan menyediakan guru pembimbing khusus
d) Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar yang dibuktikan adanya surat pernyataan
e) Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan
f) Tersedia sarana penunjang yang dapat diakses oleh semua anak
g) Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif
h) Memenuhi ketentuan prosedur administrasi yang ditetapkan pada masing-masing wilayah

i) Ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota maupun inisiatif dari sekolah untuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. (Pokja Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan, 2013)

b. Mekanisme Penyelenggaraan

Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk minimal satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Tehadap sekolah yang telah ditunjuk tersebut, selanjutnya diterbitkan surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota (Pokja Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan, 2013).

c. Pembinaan dan Monitoring

1) Pembinaan Sekolah Inklusif

Guna peningkatan mutu layanan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka pemerintah Kabupaten Kota berkewajiba melakukan pembinaan kepada semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, baik negeri maupun swasta. Operasional pembinaan dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok kerja pendidikan inklusif, asosiasi pendidikan inklusif, organisasi profesi maupun

lembaga lain terkait (Pokja Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan, 2013).

2) Monitoring

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengawal keterlaksanaan penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Hasil monitoring dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif. Materi monitoring meliputi aspek, manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun. Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Untuk mengoptimalkan hasil monitoring dalam pelaksanaannya melibatkan lembaga lain terkait, diantaranya POKJA Pendidikan Inklusif, organisasi profesi dan perguruan tinggi khususnya LPTK PLB (Pokja Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan, 2013).

3) Pelaporan

Setiap penyelenggara pendidikan inklusif Kalimantan Selatan diwajibkan membuat laporan tertulis kepada atasan langsung yang tembusannya dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan tertulis sekurang-kurangnya memuat tentang: (1) peserta didik; (2) kurikulum yang digunakan; (3) sarana prasarana; (4) tenaga pendidik dan kependidikan; (5) proses

pembelajaran; (6) hasil evaluasi, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat mengembangkan format laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lingkungan lembaga setempat (Pokja Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan, 2013).

4. Permasalahan di Sekolah Dasar Inklusif Kota Banjarmasin

Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusi adalah terjadi penolakan siswa berkebutuhan khusus dengan kondisi tertentu saat mendaftar sebagai siswa di sekolah penyelenggara inklusif. Alasan yang seringkali muncul adalah ketidaktersediaan guru yang menanganinya. Hal tersebut terpublikasikan oleh Banjarmasin Post (2018) dalam artikelnya yang berjudul "Kasus Menimpa Siswa Berkebutuhan Khusus, Disdik Kota Banjarmasin Bilang Begini" bahwa tak semua siswa berkebutuhan khusus dapat diterima. Sekolah hanya menerima dengan kadar kebutuhan khusus ringan hingga sedang dengan surat rekomendasi hasil assesment dokter maupun psikolog. Sedangkan untuk berkebutuhan khusus berat terpaksa harus masuk sekolah luar biasa.

5. Langkah-langkah yang Telah Dilakukan oleh Pihak-Pihak Terkait

Menurut Banjarmasin Post (2016) dalam artikel yang berjudul "Beri Kesempatan Anak Berkebutuhan Khusus" bahwa tiga hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan pendidikan anak berkebutuhan

khusus yaitu sistem guru (semua guru diharapkan dapat menerima dan dapat membimbing anak ABK serta memiliki pengetahuan dasar dalam membimbing anak ABK), mengembangkan P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga kependidikan). LPMP serta insentif sekolah yang mau menerima anak ABK. Sebab anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus.

Ibu Siti Wasilah dalam Antara Kalsel (2018) pada artikel yang berjudul "Banjarmasin harus jadi kota pendidikan inklusif terbaik" mengatakan,

> Kota Banjarmasin adalah ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah seharusnya menjadi kota dengan pendidikan Inklusif terbaik di Kalimantan Selatan, dan saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin karena jejak pembangunan inklusif itu sekarang sudah sampai pada pembentukan roofmap menjadi Kota Inklusif yang lebih baik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait difokuskan pada aspek kelembagaan sekolah, guru, dan sarana dan prasarana. Hal tersebut salah satunya terlihat dari jejak pembangunan inklusif sekarang sudah sampai pada pembentukan roofmap menjadi Kota Inklusif yang lebih baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat non-eksperimen. Penelitian kuantitatif non-eksperimental didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kuantitatif non eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau masa lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi apa adanya (Sukmadinata, 2005). Adapun fenomena yang akan digambarkan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Banjarmasin.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial. Dari definisi tersebut, kita langsung bisa menangkap bahwa objek penelitian memiliki cakupan luas sejauh masih berhubungan dengan topik penelitian. Dengan demikian, maka objek penelitian dalam hal ini adalah faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Banjarmasin.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini adalah guru dan kepala sekolah dari 21 sekolah dasar di Banjarmasin.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kreadibilitas tinggi dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

   Menurut Arikunto (1991: 89), "Wawancara adalah sebuah dialog antar orang yang mewawancarai dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi". Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan berbagai data dan informasi terkait faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Banjarmasin.

   Pada saat wawancara, jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti membuat pedoman wawancara yang hanya berupa garis besarnya saja tentang hal-hal yang ditanyakan dan sesuai dengan data yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah di Sekolah Dasar Inklusif Kota Banjarmasin .

2. Kuesioner

Metode angket merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian dikirimkan kepada responden untuk diisi. Angket yang telah diisi oleh responden dikembalikan kepada peneliti atau petugas survei lainnya (Burhan, 2009).

Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atau tanggapan atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka, yaitu jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya oleh peneliti dan dapat bersifat tertutup, yaitu alternatif jawaban telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Adapun instrumen daftar pertanyaan dapat berupa pertanyaan (berupa isian yang akan diisi oleh responden), checklist (berupa pilihan dengan cara memberi tanda pada kolom yang disediakan), dan skala (berupa pilihan dengan memberi tanda pada kolom berdasarkan tingkatan tertentu) (Noor, 2011).

Terdapat empat komponen inti dari sebuah kuesioner, yaitu: (1) adanya subjek, yaitu individu atau lembaga yang melaksanakan penelitian; (2) adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta mengisi atau menjawab pertanyaan secara aktif dan objektif; (3) adanya petunjuk pengisian kuesioner, yaitu petunjuk yang tersedia harus mudah dimengerti dan tidak bias (mempunyai persepsi yang macam-macam); dan (4) adanya pertanyaan atau pernyataan beserta tempat untuk mengisi jawaban, baik secara tertutup maupun terbuka (Noor, 2011).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat tertutup (angket/ kuesioner langsung tertutup) yaitu pengisian angket/kuesioner oleh kepala sekolah sekolah dasar penyelenggara inklusif di kota Banjarmasin (responden) untuk merekam data tentang faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Banjarmasin yang dipimpin oleh responden, kemudian semua alternatif jawaban yang harus dijawab oleh responden telah tertera dalam angket tersebut.

3. Dokumentasi

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertianya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen berupa gambar (foto). Dokumen gambar/foto ini dimaksudkan sebagai pelengkap atau bukti autentik terhadap setiap informasi yang di dapatkan melalui observasi langsung terkait faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Banjarmasin.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data – data secara sistematis serta obyektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan, ceklist, catatan kejadian, dan kamera untuk mengambil gambar objek penelitian yang dalam hal ini adalah faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat Sekolah Dasar di Banjarmasin.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala sosial yang diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simpulan dan atau menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentang Faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat sekolah dasar di kota Banjarmasin dilakukan pada dua puluh satu sekolah dasar inklusif yang tersebar di banjarmasin. Adapun nama-nama sekolah yang menjadia sampel dalam penelitian ini divisualisasikan dalam tabel 4.1 berikut:

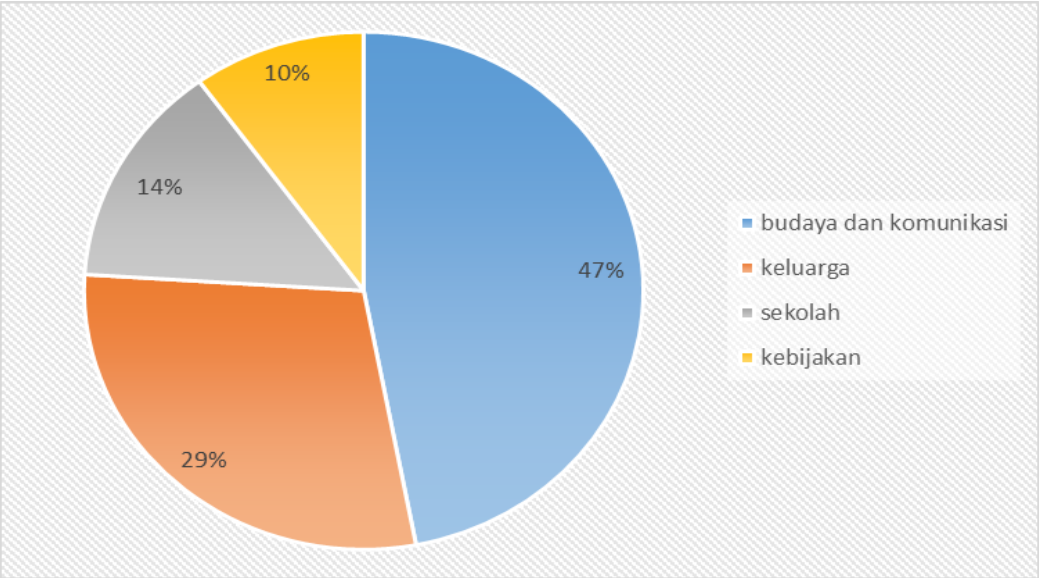
Tabel 4.1 daftar nama sekolah sampel penelitian

No	Nama Sekolah
1.	SDN Benua Anyar 8
2.	SD Harapan Bunda
3.	SDN Benua Anyar 4
4.	SDN Kuin Cerucuk 1
5.	SDN Pasar Lama 3
6.	SDN Kelayan Timur 5
7.	SDN Gadang 2
8.	SD Muhammadiyah 10
9.	SD Islam Terpadu Al-Firdaus
10.	SDN Kuin Selatan 3
11.	SDN Alalak Utara 3
12.	SD SN Kelayan Barat 2

13.	SDN Mawar 4
14.	SDN Antasan Kecil Timur 4
15.	SDN Pasar Lama 6
16.	SDN Antasan Besar 7
17.	SDN Sungai Andai 3
18.	SDN Sungai Miai 5
19.	SDN Belitung Selatan 9
20.	SDN Pekauman 3
21.	SDN Kelayan Timur 13

Untuk mendapatkan data dan informasi terkait faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat sekolah dasar di kota Banjarmasin, maka dalam hal ini peneliti melakukan penyebaran angket ke setiap sekolah, berbicara masalah Faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi pendidikan inklusi pada tingkat sekolah dasar di kota Banjarmasin, dalam hal ini kami menawarkan empat pilihan utama yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor kebijakan, dan faktor budaya dan komunikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhdapa penyelenggaan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar di banjarmasin adalah faktor budaya dan komunikasi, pada urutan kedua faktor keluarga, urutasn ketiga faktor sekolah, dan urutan terakhir adalah faktor kebijakan. Sebagaimana tervisualisasikan pada diagram di bawah ini:



Gambar 4.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusif ingkat sekolah dasar di banjarmasin

Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklsif tingkat sekolah dasar di banjarmasin khususnya dalam tiga aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek guru, dan aspek sarana prasarana.

Penyelenggaraan implementasi pendidikan inklusif legalitas sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif teruang dalam surat keputusan Dinas Pendidikan kabupaten maupun kota Banjarmasin. Program kerja inklusi termuat di dalam rencana kerja sekolah akan tetapi tidak dibiayai. Sekolah sudah melakukan dengan intensif pengendalian, monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif. Sekolah sudah melakukan koordinasi dan pendelegasian tugas kepada guru dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi, sekolah kurang melakukan secara intensif menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan jenis kebutuhan ABK untuk kelancaran kegiatan belajar – mengajar siswa ABKnya.

Sarana dan prasarana yang tersedia bagi anak bekebutuhan khusus belum cukup aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan, sekolah tidak melakukan secara khusus menyediakan anggaran secara rutin untuk pembiayaan operasional sekolah inklusi, dan juga sekolah tidak membuat laporan tertulis tahunan tentang pelaksanaan program inklusi. Sekolah sudah melakukan dengan intensif berupa melakukan pembinaan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi dalam menjalankan program pendidikan inklusi dan juga menyediakan GPK sesuai dengan kebutuhan. Di sekolah ini GPKnya tersedia akan tetapi masih kurang tidak sebanding dengan ABK yang harus dilayani. Gpk yang tersedia sudah memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-IV. Kompetensi GPK yang tersedia di sekolah ini sedikit sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagain besar guru reguler memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan dibidang pendidikan ABK, serta sebagain besar guru reguler bersikap positif terhadap pendidikan inklusif ditunjukkan dengan usaha nyata agar dapat menangani ABK sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian besar guru reguler melakukan pertemuan berkala dengan GPK untuk mendapatkan layanan yang terbaik bagi ABK. Demikian rata – rata GPK di sekolah ini ada yang menunjukkan kinerja positif sesuai dengan harapan sekolah. Di sekolah ini tidak tersedia tenaga psikolog untuk membantu penyelenggarakan pendidikan inklusif dan juga tenaga terapi sesuai kebutuhan ABK. Sekolah ini menyediakan incidental tenaga kesehatan untuk melayani semua siswanya.

Di sekolah ini tersedia akan tetapi tanpa dilengkapi sarana yang memadai berupa ruang sumber (kelas khusus) yang dilengkapi dengan peralatan, media dan sumber belajar. Bangunan sekolah ini tidak dilengkapi dengan fasilitas khusus aksesibel bagi ABK. Sekolah ini memiliki sarana pendukung mobilitas ABK seusia dengan jenis kelainannya akan tetapi terbatas. Sekolah tidak menyediakan toilet yang aksesibel dan juga tidak menyediakan tongkat putih bagi tunanetra. Sekolah ini memiliki alat bantu belajar yang tidak memadai sesuai kebutuhan ABK, menyediakan kursi roda yang terbatas dan juga menyediakan alat bantu menulis Braille dengan terbatas.

Adapun pengaruh dari keempat faktor tersebut dalam penyelenggaran pendidikan inklusif diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Budaya dan Komunikasi

Faktor yang paling berpengaru terhadap penyelenggaraan implementasi pendidikan pada tingkat sekolah dasar di banjarmasi adalah faktor budaya dan komunikasi. Dalam hal ini dukungan dari desa, kepala desa dan seluruh masyarakat setempat sangat diharapkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, karena dalam hal ini anak berkebutuhan khusus pun bagiandari masyarakat yang akan terjun di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu penerimaan dari orang tua, masyarakat dan tokoh masyarakat seempat sangat dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu bentuk dukungan dan penerimaaan

masyarakat adalah dengan melibatkan anak berkebutuhan khusus dala aktifitas sosial yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

Implikasi dari ajaran agama juga seharusnya turut membangun kesadaran masayarakat untuk dapat menerima, dan menghargai keberadaan anak berkebutuhan khusus. Ajaran agama apapun tentu memerintahkan untk berbuat baik terhadap sesama termasuk kepada anak berkebutuhan khusus yang menunjukkan perbedaaan yang ekstrim dari segi fisik,intelektual, maupun sosial emosi.

Dengan adanya dukungan masayarakat dan sinergi dengan ajaran agama, maka inklusif akan menajdi sebuah budaya tidak sebatas label yang melekat di sekolah. Sikap inklusif tidak hanya ditunjukkan oleh guru-guru di sekolah, tetapi juga dilingkungan masyarakat, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat merasa nyaman dan aman ditengah-tengah lingkungan tempat tinggalnya.

2. Faktor Keluarga

Faktor keluarga juga turut memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan implementasi pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar di banjarmasin. Orang tua yang tidak menerima keberadaan anaknya yang mengalami kebutuhan khusus, cenderung menyembunyikan anaknya, sehingga anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan yang semestinya.

Disisi lain, orang tua menerima keberadaan dan kondisi anak berkebutuhan khusus, orang tua akan menyekolahkan anaknya baik di

sekolah luar biasa maupun di sekolah inklusi. Terkhusus di sekolah inklusi, masih terdapat beberapa orang tua yang menganggap sekolah hanya sebatas penitipan semata, tanpa ada upaya bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberi dukungan dan melanjutkan pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Sikap orang tua yang demikian akan memperlambat progres dari upaya intevensi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu guru bahwa *"selama ini sekolah merasa sangat kewalahan dalam membelajarkan anak berkebutuhan khusus kerjasama dan dukungan orang tua belum kami dapatkan"*

Dengan adanya penerimaan dan dukungan dari otang tua, maka selain dapat membantu pemberian layanan kepada anak berkebutuhan khusus, maka partisipasi anak berkebutuhan khusus tidak lagi terbatas, selain itu orang tua juga dapat melindungi anak berkebutuhan khusus dari kemungkinan bullying dan kekerasan di sekolah.

3. Faktor Sekolah

Beberapa faktor sekolah yang juga turut mempengaruhi penyelenggaraan implementasi pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Banjarmasin adalah:

a. Sikap negatif di kalangan guru

   Sekolah luar biasa penyelenggara pendidikan inklusif tentu bukanlah hal yang mudah diterima oleh semua masyarakat sekolah termasuk

guru, saat ini masih banyak terdapat guru yang sikap negatif, dan tidak menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Sehingga kegiatan pembelajaran tidak sesuai kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, guru masih beranggapan bahwa kehadiran anak berkebutuhan khusus di kelas mereka justru menyulitkan dan membebani tugas guru.

b. Meningkatkan tingkat perhatian dari pihak sekolah

Selain sikap negatif guru, sekolah juga kurang perhatian terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka, tidak ada upaya pembangunan atau pengadaan sarana prasarana yang dapat memudahkan akses anak berkebutuhan khusus dalam melakukan mobilitas. Sekolah juga cederung beranggapan bahwa inklusi hanyalah sebatas label yang terpenuhi hanya sekedar hadirnya anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Sekolah cenderung acuh mengupayakan peberian pelayanan pendidikan yang prima kepada anak berkebutuhan khusus, sehingga pemberian layanan pendidikan tidak sesuai dengan keadaan, potensi, dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

c. Diperlukan penyesuaian kurikulum (Differensiasi)

Hadirnya anak berkebutuhan di sekolah reguler menuntut adanya penyesuaian kurikulum kepada anak berkebutuhan khusus, kondisi anak berkebutuhan khusus yang berbeda tentu juga menuntut adanya penyesuaian dalam pemberian layanan. Anak-anak berkebutuhan

khusus yang memilki potensi di bawah rata-rata menuntut adanya penurunan kompetensi yang harus dicapai, anak berkebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan di atasa rata-rata maka guru seyogyanya mengembangkan kurikulum deferensiasi dengan meningkatkan atau mengembangkan komptensi yang harus dicapai oleh peserta didik berkebutuhan khusus.begitupun halnya jika anak berkebutuhan khusus memilki kemampuan kognitif yang sama dengan siswa reguler pada umumnya, maka kurikulum yang digunakan bisa diduplikasi dengankurikulumyang diberlakukan untuk anak berkebutuhan khusus.

d. Diperlukan peningkatan implementasi kebijakan.

Salah satu konsekuensi dari penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah diperlukan peningkatan implementasi kebijakan, kebijakan yang diambil harus memepertimbangkan kondisi anak berkebutuhan khusus. Kebijakan idealnya tidak hanya menguntungkan satu belah pihak saja. Misalnya saja kebijakan dalam hal penilaian. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah diberlakukan sama dengan anak berkebutuhan khusus, namun secara kualitas capaian tersebut memiliki pemaknaan pencapaian yang berbeda antara anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler pada umumnya. Jika kebijakan yang diambil tidak sesuai dengankebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka tentu dalam implementasinya akan menemui banyak kendala maupun hambatan, karena tida adanya regulasi yang jelas atas setiap tindakan yang akan

ditempuh guna pelayanan pendidikan kepada peserta didik di sekolah dasar.

e. Diperlukan penggunaan sumber daya yang efektif.

Salah satu hal yang juga sangat perperan dalam keberhasilan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan di sekolah ini adalah guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus merupakan guru yang memilki latar belakang keilmuan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa yang memiliki pemahaman yang lebih tentang anak berkebutuhan khusus. GPK bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. GPK dan guru kelas seyogyanya saling berkolaborasi dalam pemberian layanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, mulai dari perencanaa, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. GPK bertugas melakukan identifikasi dan asesmen pada anak berkebutuhan khususuuntuk menggali informasi terkait potensi, kelemahan, dan kebutuhan belajar anak. GPK juga bertugas mengembangkan PPI sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilakukan sehingga perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan belajar anak.

f. Pentingnya kemitraan dan komunikasi

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga sebaiknya menjalin kerjasama dengan disiplin ilmu yang lain guna mendukung

implementasi pendidikan inklusif. Berbagai disiplin ilmu yang dapat dijadikan sebagai mitra dalam pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah psikolog, dokter anak, pekerja sosial. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sekolah harus bisa menjalin kerjasama dengan oratngtua anak berkebutuhan khusus dan masyarakat setempat karena keberhasilan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus dilandasi kerjasama dan komunikasi dengan berbagai pihak.

4. Faktor Kebijakan

Anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus memperoleh dukungan pembelajaran tambahan dalam konteks kurikulum reguler, bukan kurikulum yang berbeda. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembelajaran pada Sekolah Inklusi, guru harus mengembangkan perangkat pembelajaran (silabus dan RPP) dengan mempertimbangkan perbedaan individu. Pasal 8 Pembelajaran pada Pendidikan Inklusi mempertimbangkan prinsipprinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Penyajian isi materi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan kesiapan bantuan guru serta menerapkan kefleksibelan waktu belajar serta dalam proses pembelajaran bekerja sama dengan pihak terkait seperti orang tua/wali, masyarakat, narasumber, guru, paramedic, terapis, dan dunia usaha.

Kebijakan pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kebijakan pemerintah

saat ini mewajibka semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah yang ramah dan terbuka untuk semua anak. Sekolah yang mampu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Pemerintah mewajibkan setiap sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, namu saat ini pemerintah tidak memberikan ketegasan regulasi terhadap komponen-komponen dalam layanan pembelajaran.misalnya dalam hal penilaia, pemerintah tidak memberikan regulasi yang jelas terkait bagaimana sistem kenaikankelas siswa berkebutuhan khusus, bagaimana pelaksanaan ujian nasional bagi siswa berkebutuhan khusus, serta bagaimana implikasi kriteria ketuntasan minimal yang diberlakukan bagi anak berkebutuhan khusus.

B. Pembahasan

Faktor budaya dan komunitas Peserta menyoroti pentingnya melibatkan komunitas lokal sehubungan dengan penerapan pendidikan inklusif. Komunitas itu juga terkait erat dengan masalah budaya, agama, dan keluarga. Keterlibatan masyarakat adalah fitur penting dalam implementasi pendidikan inklusif yang efektif, baik di Banjarmasin maupun di tempat lain. Kami telah mengetahui sejak lama bahwa siswa yang termasuk dalam sekolah cenderung memiliki lebih banyak keterlibatan dan persahabatan dalam komunitas lokal mereka dan sebaliknya (McDonnell et al. 1991). Loreman et al. (2009) mencatat bahwa 'dengan memasukkan siswa di kelas reguler, mereka menjadi bagian dari tatanan sosial yang lebih besar dan jaringan yang sejalan dengan sekolah' (24). Desa-desa tradisional masih menjadi dasar dari sebagian besar komunitas di daerah Banjarmasin, dan karenanya bagian dari proyek pendidikan inklusif di negara-negara ini melibatkan

dukungan dari kepemimpinan desa (seperti kepala desa) bersama dengan setiap anggota desa. Peran masyarakat ditekankan terutama oleh warga Banjarmasin yang mencatat peran penting keluarga, desa, gereja, distrik, pemuda, dan komite perempuan dalam menerapkan pendidikan inklusif. Orang-orang Banjarmasin mengutamakan hati di tengah peta konsep mereka, dan dari hati muncul ide-ide keluarga, budaya, nilai-nilai, kepercayaan, dan komunitas. Ini konsisten dengan contoh-contoh orang Banjarmasin tentang pentingnya komunitas yang digunakan dalam karya McDonald dan Tufue-Dolgoy (2013) yang mengutip gagasan kerendahan hati, rasa hormat, dan cinta sebagai prinsip fundamental yang mendasari struktur masyarakat Samoa.

Lembaga keagamaan dipandang memiliki dampak pada pelaksanaan pendidikan inklusif di kota Banjarmasin. Kota Banjaramasin merupakan kota yang mayoritas penduduknya beragama islam. Agama islam banyak mnegajarkan tentang tolng menolong, berbuat baik, berbuat adil, hal tersebut tentu relevan dan dapatn menjadi landasan dalam praktek implementasi pendidikan inklusif di Banjarmasin. 'Berdasarkan hasil penelitian ini, menjadi religius memiliki efek positif pada bagaimana anggota profesi penolong atau orang yang belajar menjadi anggota profesi penolong memandang penyandang disabilitas'. Mirip dengan peran budaya, religiositas di kota Banjarmasin kemungkinan memainkan peran positif sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif.

Kebijakan menguraikan pentingnya memiliki kebijakan yang mencerminkan realitas sekolah, dan mengadvokasi penggunaan sumber daya sekolah yang lebih efektif. Temuan yang menarik dari penelitian ini berkaitan dengan keunggulan pandangan peserta tentang peran pemerintah, kebijakan, dan perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di kota Banjarmasin. Pendidikan inklusif didukung di wilayah ini, baik melalui kebijakandearah dan kebijakan nasional; namun, sekolah yangmenjadi sample dalam penelitian ini memandang kurangnya kebijakan dan undang-undang sebagai faktor pembatas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Fiji, misalnya,

telah memiliki undang-undang khusus disabilitas nasional sejak 1994 dan mengadopsi Konstitusi 1997 yang mempromosikan non-diskriminasi dan bahkan tindakan afirmatif untuk kelompok yang kurang beruntung. Menurut UNICEF (2010) 'Kementerian Pendidikan memiliki pandangan yang beragam tentang Inklusif Education. Meskipun tidak membayangkan penutupan sekolah khusus, ia berpendapat bahwa tujuan sekolah khusus dimasukkan ke dalam sistem sekolah umum.

Beberapa peneliti (Slee dan Allan 2001) telah menunjukkan bahwa apa yang tampak seperti kebijakan progresif sehubungan dengan pendidikan inklusif tidak selalu mencerminkan praktik, dan dalam hal ini, tampaknya peserta dari Pasifik melihat jumlah dan kualitas kebijakan tersebut. yang ada tidak memadai dan tertanam sesuai dengan pandangan barat tentang sekolah. Alasan di balik kesenjangan kebijakan-praktik, dan bahkan bahkan kurangnya kebijakan yang memadai yakni tidak jelas dan memerlukan studi lebih lanjut. Singkatnya, negara-negara yang memiliki kebijakan biasanya memandangnya tidak memadai sehubungan dengan konteks, sementara beberapa negara lain tidak memiliki kebijakan apa pun. Ketika kebijakan dikembangkan, seperti yang saat ini terjadi di sejumlah negara, peserta menyatakan keinginan untuk mempertimbangkan konteks lokal.

Peran keluarga Sebagian besar peserta sepakat bahwa keluarga terus memainkan peran penting dalam melaksanakan pendidikan inklusif; Namun, ada beberapa hambatan. Tercatat bahwa orang tua sering merasa malu memiliki anak disabilitas. Peserta dalam penelitian ini berpendapat bahwa orang tua takut bahwa anak-anak penyandang disabilitas mereka tidak akan diperlakukan dengan baik di sekolah, dan karena ingin melindungi mereka dari risiko pelecehan, mereka enggan mengirim mereka. Selain itu, ada alasan ekonomi untuk menjauhkan anak-anak dari sekolah. Upah yang didapat dari pekerja anak terkadang penting dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga miskin. Ini adalah masalah yang sangat mendalam dan, jelas, keluarga anak-anak disabilitas di kota Banjarmasin membutuhkan banyak dukungan.

Masalah pekerja anak berbicara langsung dengan kondisi ekonomi di beberapa Kepulauan Pasifik. Di sinilah pemerintah perlu terlibat tidak hanya dalam mengeluarkan dan menegakkan undang-undang yang melarang pekerja anak, tetapi juga dalam memberikan dukungan kepada keluarga miskin sehingga mereka tidak mengalami kesulitan keuangan dalam mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Ini dapat dicapai dengan memberikan insentif dalam berbagai bentuk (Loreman, Forlin, dan Sharma 2014). Memang, pendidikan dipandang sebagai jalan keluar utama dari kemiskinan (Julius dan Bawane 2011) dan dengan demikian dukungan semacam itu dapat memutus siklus kemiskinan bagi keluarga-keluarga ini dan mungkin komunitas tempat mereka tinggal.

Peserta dalam penelitian ini melihat faktor-faktor pribadi anak penyandang disabilitas sebagai kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Ini termasuk sikap individu anak, penerimaan mereka terhadap pendidikan yang ditawarkan, ego dan harga diri anak, dan keseluruhan pola pikir anak sehubungan dengan membuat pendidikan inklusif berhasil. Sementara para peserta sama sekali tidak menyalahkan siswa penyandang disabilitas atas kekhususan yang mereka terima, deskripsi mereka tentang sifat-sifat siswa yang dapat membantu dalam menerapkan pendidikan inklusif adalah jitu. Ini mengingatkan pada integrasi di negara-negara maju pada 1980-an dan 1990-an, di mana siswa diharapkan pada dasarnya mengaktualisasi diri terhadap norma yang telah ditentukan (Andrews et al. 2014; Vlachou 2004). Bagaimana jika seorang siswa tidak memiliki sifat-sifat positif di area yang diuraikan? Apakah siswa itu akan menjadi kandidat untuk dikecualikan, dan jika demikian, dapatkah sistem seperti itu benar-benar dianggap inklusif?

Diskusi tentang masing-masing anak dan peran mereka dalam inklusi di Pasifik perlu dihayati dengan penuh pertimbangan. Peserta studi mencatat bahwa gagasan tentang hak anak sering dianggap sebagai gagasan Barat yang dapat menciptakan kesulitan budaya. Bahkan istilah 'hak' agak asing. Anak-anak tidak dididik karena mereka memiliki hak, tetapi karena itu adalah hal yang benar bagi suatu komunitas untuk mendukung

mereka. Di Kota Banjarmasin, hak dipegang oleh keluarga. Gagasan tentang hak individu tidak seriskan hak-hak keluarga kolektif dan unit desa. Penduduk kepulauan Pasifik cenderung tidak berbicara tentang hak-hak anak, tetapi lebih pada keluarga dan masyarakat di mana hak-hak individu itu melekat. Le Fanu (2013) mengemukakan bahwa bahkan pedagogi harus mencerminkan pendekatan komunitas di Banjarmasin, karena anak-anak belajar terbaik dalam kebersamaan, pengalaman, dan berbasis aktivitas.

Mereformasi praktik sekolah Peserta mengakui bahwa untuk menyediakan pendidikan yang efektif untuk semua siswa, sekolah-sekolah di Banjarmasin perlu mengadopsi praktik-praktik khusus, meskipun sejauh mana sekolah sebenarnya melakukan ini dipertanyakan. Sikap negatif dari administrasi sekolah, staf, dan siswa terhadap disabilitas dicatat perlu ditangani. Sekolah dilihat sebagai kebutuhan untuk menjadi lebih tertanam dalam komunitas lokal, dan untuk terlibat dalam hubungan yang lebih kolaboratif dengan keluarga. Kurikulum dipandang sebagai membutuhkan penyesuaian agar lebih efektif memenuhi kebutuhan semua. Kurangnya sumber daya yang memadai di sekolah juga dipandang sebagai masalah.

Hambatan-hambatan terhadap implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar ini tidak begitu berbeda (Johnstone dan Chapman 2009). (Sharma dan Loreman 2013), kami menyoroti banyak hambatan yang sama terhadap pendidikan inklusif yang ditemukan dalam literatur internasional, termasuk persepsi guru tentang sumber daya, dampak dari sikap negatif, dan kurikulum yang tidak responsif. Kami mencatat bahwa inilah masalahnya, mungkin, bahwa kelemahan ada di sekolah-sekolah modern kami sampai pada titik di mana relevansi mereka untuk pendidikan setiap anak mungkin dipertanyakan, dan potensi untuk melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan adalah signifikan (Green and Hoover-Dempsey 2007). Ketika negara-negara berkembang mengenali masalah-masalah ini dalam sistem mereka sendiri, dengan beberapa khalayak menyerukan adopsi agenda reformasi radikal (Slee 2011), negara-negara berkembang harus melanjutkan dengan hati-hati dalam mengatasi masalah di sekolah mereka sendiri

agar tidak mengulangi kesalahan yang sama . Reformasi membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang jika ingin berhasil.

Penggunaan sumber daya yang efektif seperti Layanan kesehatan, transportasi, keuangan, dan kesejahteraan mendapat perhatian, meskipun kecil dibandingkan dengan beberapa tema lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Pentingnya pendekatan terpadu, mungkin lintas-kementerian dan bahkan lintas-nasional untuk pendidikan inklusif perlu ditekankan. Ini akan mempertimbangkan pandangan yang lebih holistik terhadap anak tersebut, namun pendekatan semacam itu telah terbukti sebagai upaya yang sulit dipahami (Lengan 2013). Diperlukan koordinasi yang cermat untuk menghindari duplikasi layanan dan dengan demikian memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Ini mungkin tugas yang lebih mudah mengingat skala kecil dan kerja sama yang sering terjadi antara Kementerian di tingkat nasional. Organisasi Non-Pemerintah (LSM) memainkan peran penting sehubungan dengan pendidikan inklusif dan advokasi disabilitas di Kota Banjarmasin, dan memang, banyak sekolah dalam penelitian ini adalah perwakilan dari LSM. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa pentingnya organisasi-organisasi ini disorot. Organisasi-organisasi ini perlu dilibatkan dalam upaya pemerintah dan memang ditempatkan dengan baik untuk membantu upaya kolaboratif lintas-nasional. Ini hanya dapat terjadi jika kapasitas mereka terus dibangun untuk membantu pelaksanaan pendidikan inklusif.

Tantangan sehubungan dengan geografi perlu dicatat, dan memang, dapat diatasi melalui penyebaran sumber daya yang lebih efektif. Beberapa anak, misalnya, gagal bersekolah karena mereka tinggal di daerah terpencil di mana sekolah tidak ada. Cerita tentang anak-anak yang pergi ke sekolah dengan sampan, sambil mencari ikan, juga mengungkap masalah akses bagi anak-anak penyandang cacat. Anak-anak dengan masalah mobilitas tidak dapat bepergian dengan kano atau, lebih umum, tidak dapat mengendalikan kano seperti anak-anak pada umumnya yang lain ke sekolah. Jelas, solusi lokal perlu ditemukan untuk membantu anak-anak ini bersekolah, atau dalam

memberikan bentuk-bentuk pendidikan alternatif, dan ini diakui oleh para peserta. Praktek saat ini adalah bahwa anak-anak ini tidak menerima pendidikan formal sama sekali. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung keluarga diambil dalam konsultasi penuh dengan masyarakat setempat. Salah satus sekolah menyarankan perlunya pendidikan kesadaran akan disabilitas bagi orang tua. Keluarga perlu percaya bahwa anak-anak mereka akan diperlakukan dengan baik di sekolah, dan kepercayaan ini hanya dapat dibangun pada pengembangan hubungan positif antara sekolah dan rumah, yang diprakarsai oleh sekolah dan mungkin dimediasi oleh masyarakat. Ini adalah kasus di mana orang tua dapat mendukung gagasan inklusi dari sudut pandang filosofis, tetapi juga bahwa mereka mungkin memiliki keprihatinan ketika datang ke implementasi praktis penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahsan pada baba sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah budaya dan komunikasi, sekolah, keluaga, dan kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat penulis rekomendasikan antara lain sebagai berikut:

1. Orang tua sebaiknya proaktif bekerjasama dengan pihak sekolah dalam pemberian layanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai.
2. Masyarakat sebaiknya lebih terbuka dan menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di tengah masyarakat;, sehingga akan terwujud budaya inklusif.
3. Pemerinta sebaiknya menyusun sebuah kebijakan yang jelas sebagai payung hukum dalam implementasi pendidikan inklusif.
4. Sekolah harus selalu berupaya untuk siaga terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Misalnya dengan menjalin kerjasama dnegan berbagai pihak, berbagai disiplin ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

Antara Kalsel. 2018. *Banjarmasin Harus Jadi Kota Pendidikan Inklusif Terbaik*. Diakses tanggal 11 Oktober 2019 dari https://kalsel.antaranews.com/berita/-72816/banjarmasin-harus-jadi-kota-pendidikan-inklusif-terbaik

Antara Kalsel. 2018. *SD Banjarmasin Ditargetkan Jadi Sekolah Inklusi*. Diakses tanggal 11 Oktober 2019 dari https://kalsel.antaranews.com/berita/62156/sd-banjarmasin-ditargetkan-jadi-sekolah-inklusi

Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ainscow, M., A. Dyson, S. Goldrick, and M. West. 2011. *Developing Equitable Education Systems*. Abbingdon: Routledge.

Andrews, J., MA Drefs, J. Lupart, and T. Loreman. 2014. "Foundations, Principles, and Student Diversity." In *Understanding and Addressing Diversity in Canadian Schools*, edited by J. Andrews and J. Lupart, 24–73. Toronto: Nelson.

Andrews, J., and J. Lupart. 2000. *The Inclusive Classroom: Educating Exceptional Children*. 2nd ed. Toronto: Nelson. AusAID. 2012. Program Design Document for a Regional Pilot Program in Papua New Guinea, Samoa, and Solomon Islands – Pacific Benchmarking for Education Results (PaBER).

Banjarmasin Post. 2016. *Beri Kesempatan Anak Berkebutuhan Khusus*. Diakses tanggal 11 Oktober 2019 dari http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/08/-30/beri-kesempatan-anak-berkebutuhan-khusus

Banjarmasin Post. 2018. *Kasus Menimpa Siswa Berkebutuhan Khusus, Disdik Kota Banjarmasin Bilang Begini*. Diakses tanggal 11 Oktober 2019 dari http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/26/kasus-menimpa-siswa-berkebutuhan-khusus-disdik-kota-banjarmasin-bilang-begini

Banjarmasin Post. 2018. *Sekolah Inklusi Rujukan Ternyata Terbatas, Begini Kondisinya Saat Dipantau Anggota Dewan*. Diakses tanggal 11 Oktober

2019 dari http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/16/sekolah-inklusi-rujukan-ternyata-terbatas-begini-kondisinya-saat-dipantau-anggota-dewan

Burhan Bungin. 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2004b. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas

Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media

JDIH BPK RI. 2012. *Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 65 Tahun*. Diakses tanggal 22 Oktober 2018 dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50633

JDIH-Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 2017. Perda No. 3 Tahun 2017. Diakses tanggal 11 Oktober 2019 dari http://jdih.kalselprov.go.id/product/detail/433.

Julius, MK, and J. Bawane. 2011. "Education and Poverty, Relationship and Concerns. As Case for Kenya." *Problems of Education in the 21st Century* 32: 72–85.

Kustawan, Dedy dan Budi Hermawan. 2013. Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak. Jakarta Timur: PT. Luxima Metro Media

Kwon, H. 2005. *Inclusion in South Korea: Inclusion. Developing Learning and The current situation and future Participation in School,* London: directions. International Journal of CSIE. Disability, Development and Golis, S. A. at al (1995) Inclusion in Education, 52, 1,59-68.

Kniveton, BH 2004. "A Study of Perceptions that Significant Others Hold of the Inclusion of Children with Difficulties in Mainstream Classes." *Educational Studies* 30 (3): 331–343.

Le Fanu, G. 2013. "The Inclusion of Inclusive Education in International Development: Lessons from Papua New Guinea." *International Journal of Educational Development* 33: 139 – 148.

Leyser, Y., and R. Kirk. 2004. "Evaluating Inclusion: An Examination of Parent Views and Factors Influencing their Perspectives." *International Journal of Disability, Development, and Education* 51 (3): 271–285.

Loreman, T., C. Forlin, and U. Sharma. 2014. “Measuring Indicators of Inclusive Education: A Systematic Review of the Literature.” In *Measuring Inclusive Education. International Perspectives on Inclusive Education*, edited by C. Forlin and T. Loreman, 169–192. Bingly, UK: Emerald

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana

Pokja Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan. 2013. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan.* Banjarmasin: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selata

Prastiyono. (2013). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya)*. Jurnal Administrasi Publik, 11 (1), 117 –128

Skorten, Marriam. 2003. *Menuju Inklusi Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar*. Bandung: Program Pasca Sarjan UPI.

Sukmadinata, Nana Syaodih.2005. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya

Yuwono, Imam dan Utomo. 2015. *Pendidikan Inklusif Paradigma Pendidikan Ramah Anak.* Banjarmasin: Pustaka Banua